

## **The 5th Sustainable Development Goal: Women's Participation in West Nusa Tenggara's Economic Growth**

**Samuel Fery Purba<sup>1</sup>, Mentari Wahyuningsi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional, [samu003@brin.go.id](mailto:samu003@brin.go.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, [mentariwahyuningsi@gmail.com](mailto:mentariwahyuningsi@gmail.com)

---

**Keywords:**

Gender Development Index, Gender Empowerment Index, Gender Equality, The Involvement of Women in Parliament, Women as Professionals

**Abstract:** *The 5th Sustainable Development Goal (SDG), gender equality, is one of the highest priorities for the Indonesian government. Gender equality has the potential to reduce poverty and increase economic growth in regions and countries. The purpose of this research was to examine how women's participation in the Gender Development Index, the Involvement of Women in Parliament, the Gender Empowerment Index, and Women as Professionals affected economic growth in West Nusa Tenggara. This quantitative study makes use of secondary data obtained from the Statistics Indonesia website. The analytical method used is panel data regression analysis with time series data for 2017–2021 and cross-sectional data from 2 cities and 8 regencies in West Nusa Tenggara. The random effect model (REM) is the econometric model that was chosen to answer the research hypotheses. The findings of this study found that the Gender Development Index, the Involvement of Women in Parliament, and Women as Professionals have a significant positive effect on economic growth, while the Gender Empowerment Index has a significant negative effect on economic growth. Local governments and other stakeholders have a contribution to make in increasing women's participation in various sectors of life.*

**Kata Kunci:**

Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Kesetaraan Gender, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional

**Abstrak:** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke 5 yaitu kesetaraan gender menjadi salah satu prioritas yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia. Kesetaraan gender mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh partisipasi perempuan pada indikator Indeks Pembangunan Gender, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laman Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel, dengan data deret waktu tahun 2017 - 2021 dan data penampang silang yaitu 2 kota dan 8 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. *Random Effect Model* (REM) menjadi model ekonometrik terpilih untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indeks Pembangunan Gender, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

---

**Article History:**

Received: 19-03-2023

Online : 05-04-2023



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license



### A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, menjadi tujuan yang ingin dicapai semua negara di dunia. TPB memberikan pencapaian yang general dan tanpa merugikan generasi penerus di setiap negara. Tujuan pembangunan berkelanjutan memberikan dampak dalam 4 aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan (hukum dan tata Kelola). TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang harus dicapai untuk menyejahterakan masyarakat (Sekretariat Nasional SDGs, 2022).

Negara yang maju dapat dilihat dari pencapaian pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu pembangunan manusia yang sering dibahas dalam pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah ketidaksetaraan gender. Kondisi tersebut disebabkan perempuan masih sulit mendapatkan akses dalam aspek tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan, sehingga ketimpangan gender semakin tinggi tinggi (Nova, 2022; Sari & Arif, 2022). Ketidaksetaraan gender dapat diperkecil dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tanpa membandingkan gender atau yang sering disebut dengan kesetaraan gender (Bertay et al., 2020).

Kesetaraan gender adalah satu dari tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan ke 5 yang diharapkan menurunkan tingkat ketidaksetaraan gender, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dan pemberdayaan perempuan, guna memajukan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Indonesia. Kesetaraan gender menjadi solusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Arifin, 2018).

Partisipasi perempuan menjadi topik yang perlu dibahas saat memperbincangkan kesetaraan gender. Partisipasi perempuan tidak hanya dalam mengurus rumah tangga saja, pemikiran yang lebih luas perempuan dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan karir dan bakatnya, tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Pengukuran kesetaraan gender di Indonesia menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indikator tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam pengukurannya, Indeks Pembangunan Gender diukur secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat mengetahui masing-masing kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Indeks Pemberdayaan Gender mengukur partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di setiap daerah berbeda-beda, hal ini menunjukkan kesetaraan gender belum merata di daerah kota dan kabupaten dalam satu provinsi. Pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender antara Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Barat berbeda setiap tahunnya. Gambar 1 menggambarkan perbandingan kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Indonesia dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 – 2021.

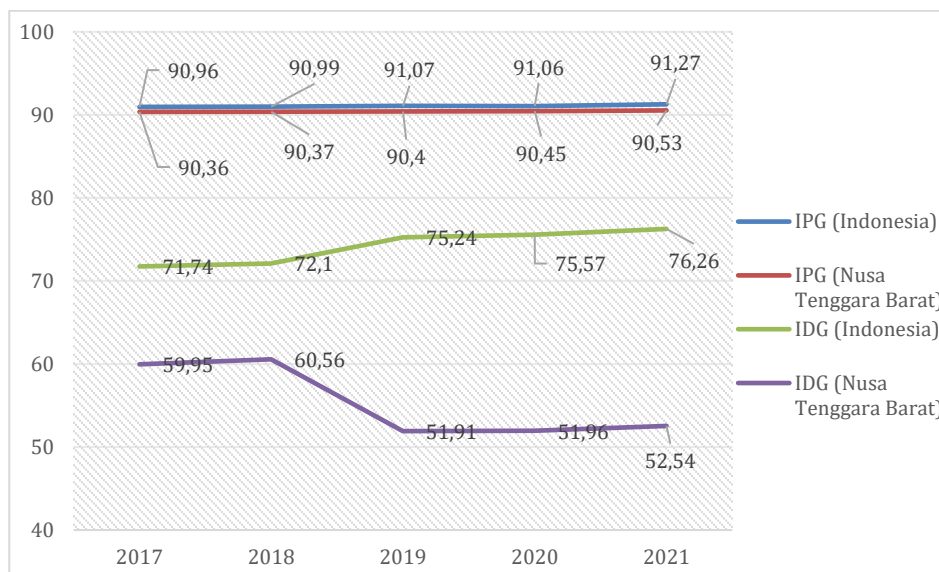
## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 71-82



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022 & 2023)

Gambar 1. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender antara Indonesia dan Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 1, perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia dan Nusa Tenggara Barat cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2017-2021. Namun IPG Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sedikit sebesar 0,01 dibandingkan tahun lalu, sehingga menjadi 91,06. Kondisi ini disebabkan tahun 2020 seluruh daerah di Indonesia mengalami Pandemi COVID-19 yang menyebabkan partisipasi perempuan menjadi terbatas untuk menghindari virus tersebut. Tahun 2021 IPG Indonesia mengalami pemulihan dan mengalami kenaikan sebesar 91,27. Jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat, IPG provinsi tersebut masih dibawah IPG Indonesia, tetapi dilihat dari perkembangannya IPG Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat setiap tahunnya, tahun 2017 IPG sebesar 90,36 dan tahun 2021 sebesar 90,53. IPG yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, memberikan korelasi yang positif terhadap perekonomian (Amory, 2019). Berdasarkan penelitian Novtaviana (2020), Nursini & Syahrul (2022), dan Sari (2021) bahwa Indeks Pembangunan Gender memberikan korelasi yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Gambar 1 memperlihatkan perbedaan yang cukup jauh antara Indonesia dan Nusa Tenggara Barat. IDG Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan, tahun 2017 IDG sebesar 71,74 sedangkan tahun 2021 IDG sebesar 76,26. IDG Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 8,65 pada tahun 2019, sebelumnya IDG tahun 2018 sebesar 60,56. Penurunan kondisi IDG disebabkan bencana alam yaitu gempa bumi sehingga memberikan dampak terhadap penurunan pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi dan politik di Nusa Tenggara Barat. Tahun 2019-2021 IDG mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga partisipasi perempuan telah meningkat di provinsi tersebut. Semakin tinggi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dapat memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah (Ginting & Sihura, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender memberikan korelasi yang positif terhadap perekonomian (Infarizki et al., 2020; Novtaviana, 2020).

## **Seminar Nasional LPPM UMMAT**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 71-82

Selain IPG dan IDG, untuk mengukur keterhubungan partisipasi perempuan terhadap perekonomian menggunakan indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP). Keterlibatan Perempuan di Parlemen mengukur partisipasi perempuan dalam aspek politik yang duduk di Parlemen daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022b) tahun 2017-2021 bahwa KPP Indonesia setiap tahunnya meningkat, sedangkan KPP Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan KPP terjadi tahun 2019 sebesar 7,69%, dimana tahun 2018 KPP sebesar 9,23% sedangkan tahun 2019 KPP sebesar 1,54%. Selain itu, persentase rata-rata KPP Nusa Tenggara Barat masih jauh dari persentase rata-rata KPP Indonesia. Menurut Yuslin (2021) Keterlibatan Perempuan di Parlemen akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Supanji (2021) menambahkan partisipasi perempuan dalam politik mampu memberikan gagasan peraturan yang mendukung kaum perempuan dan anak.

Indikator keterampilan perempuan diukur menggunakan persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP). Data Badan Pusat Statistik (2022c) menginformasikan bahwa PTP Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan persentase, sedangkan PTP Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat, tetapi tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan sebesar 0,61% dari tahun 2018 PTP sebesar 45,66% menjadi 45,05% tahun 2019, kondisi tersebut terjadi pasca bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Barat sehingga mempengaruhi sedikit persentase PTP. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga profesional akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu menambah pendapatan rumah tangga (Rajagukguk, 2015; Renie, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengkaji dampak variabel independen terhadap variabel dependen yaitu PDRB. Tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain: judul dan jenis variabel penelitian, lokasi penelitian, jumlah dan jangka waktu observasi, serta variabel penelitian yang dianalisis secara bersamaan belum banyak dikaji. Permasalahan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan mengamati dan menganalisis pengaruh partisipasi perempuan pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP) terhadap PDRB per kapita di Nusa Tenggara Barat.

### **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Data sekunder di analisis dalam rentang waktu tahun 2017 - 2021, pada lokasi 2 kota dan 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi yang diteliti, antara lain: Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independent, antara lain: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP). Sedangkan variabel dependennya yaitu PDRB per kapita yang merupakan proksi pertumbuhan ekonomi di daerah.

## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 71-82

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel independen (IPG, KPP, IDG, dan PTP) terhadap variabel dependen (PDRB) di Nusa Tenggara Barat. Metode pengolahan data menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan data sintesis dari data *cross section* dan data *time series*. Model statistika ini lebih sesuai dan efisien, sehingga mampu menganalisis korelasi dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi data panel penelitian, sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPG_{it} + \beta_2 KPP_{it} + \beta_3 IDG_{it} + \beta_4 PTP_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Di mana:

$PDRB_{it}$  : Produk Domestik Regional Bruto di kota/kabupaten i pada tahun t (ribu Rp)

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien regresi

$IPG_{it}$  : Indeks Pembangunan Gender di kota/kabupaten i pada tahun t (indeks)

$KPP_{it}$  : Keterlibatan Perempuan di Parlemen di kota/kabupaten i pada tahun t (persen)

$IDG_{it}$  : Indeks Pemberdayaan Gender di kota/kabupaten i pada tahun t (indeks)

$PTP_{it}$  : Perempuan sebagai Tenaga Profesional di kota/kabupaten i pada tahun t (persen)

$\varepsilon$  : Residual

Hipotesis penelitian digunakan sebagai jawaban sementara dari permasalahan penelitian, yang nantinya akan dianalisis dan diuji secara statistik. Hipotesis studi ini ada 4, antara lain ini adalah: a)  $H_{IPG}$ : IPG berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap PDRB, b)  $H_{KPP}$ : KPP berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap PDRB, c)  $H_{IDG}$ : IDG berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap PDRB, dan d)  $H_{PTP}$ : PTP berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap PDRB.

Struktur regresi data panel akan menghasilkan 3 (tiga) model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). CEM (*Pooled least square*) adalah model tersederhana yang menyatukan data *cross section* dan *time series*, dimana perilaku data-data penelitian antar individu dianggap tidak ada perbedaan pada periode penelitian (Gujarati et al., 2017). Model FEM merupakan model yang mengasumsikan setiap data dalam model memiliki intersep yang tidak sama, namun slope antar data yang konstan (Gujarati et al., 2017). Selanjutnya model REM yang mampu mengatasi ketidakpastian dari model FEM, setiap residual data individu dan residual secara agregat diasumsikan tidak saling berpengaruh (Gujarati et al., 2017).

Model regresi data panel yang diperoleh tersebut, selanjutnya dilakukan uji pemilihan model terbaik dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM (Gujarati et al., 2017). Uji Chow adalah uji untuk memilih antara model CEM dan FEM. Uji Hausman merupakan pengujian dalam memilih model antara FEM dan REM. Kemudian Uji LM adalah memilih model di antara CEM dan REM. Ketiga uji tersebut di analisis sesuai ketentuan dalam setiap uji dengan batas nilai probabilitas 5% ( $\alpha$ ). Model tersebut dilakukan pengujian asumsi klasik, sehingga dapat memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased*. Pengujian asumsi klasik, antara lain: uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

Model yang terpilih dilakukan uji F-statistik, uji t-statistik, dan hasil koefisien determinasi (Gujarati et al., 2017). Uji F-statistik untuk mengkaji kelayakan model regresi data panel secara simultan, variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik digunakan untuk mengkaji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya hasil koefisien determinasi digunakan untuk mengukur variabel dependen mampu dijelaskan secara baik oleh variabel independen.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat dianalisis dengan metode regresi data panel, sehingga diperoleh 50 data observasi dan menghasilkan 3 model regresi data panel. Berdasarkan Tabel 1, uji Chow menghasilkan nilai probabilitas *cross section chi-square* senilai 0,0000 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (5%), maka  $H_1$  adalah FEM. Selanjutnya uji Hausman memiliki nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,7226 (lebih besar dari 5%), maka  $H_0$  adalah REM. Pengujian terakhir yaitu uji LM, nilai probabilitas Breusch-pagan sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 5%, maka  $H_1$  adalah REM. Uji statistik pemilihan model menunjukkan bahwa model yang mampu menjawab hipotesis penelitian adalah *Random Effect Model* (REM). Tabel 1 menunjukkan hasil pemilihan model regresi data panel pada penelitian ini.

Tabel 1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Jenis Uji Statistik	Nilai Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	0,0000	
Uji Hausman	0,7226	
Uji LM	0,0000	<b>REM</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 9.0

Model REM yang terpilih, dilakukan proses uji asumsi klasik untuk mengakui model REM tidak terdapat penyimpangan statistik. Uji normalitas digunakan untuk mengkaji data dalam model regresi penelitian menyebar normal atau tidak. Nilai probabilitas Jarque-Bera pada uji normalitas senilai sebesar 0,5925 (< 5%), sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya uji multikolinearitas untuk melihat data dalam model tersebut tidak diperoleh korelasi sempurna di antara variabel independen. Nilai korelasi pada uji multikolinearitas di setiap variabel independen masih lebih kecil dari 0,80. Kesimpulannya data dalam model ini tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas. Model terpilih yaitu REM telah memanfaatkan pembobotan *cross-section weight*, maka model tersebut mampu mengatasi masalah heterokedastisitas dan autokorelasi (Gujarati et al., 2017). Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas dan uji multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dan Uji Multikolinearitas

Uji Normalitas				
Probabilitas Jarque-Bera	0,5925			
Uji Multikolinearitas				
	IPG	KPP	IDG	PTP
IPG	1.0000	0.4038	0.4985	0.6469
KPP	0.4038	1.0000	0.8353	0.0703
IDG	0.4985	0.8353	1.0000	0.2268
PTP	0.6469	0.0703	0.2268	1.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 9.0

Pengujian *goodness of fit* terdiri dari uji F-statistik, t-statistik, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Pada uji F-statistik, nilai probabilitas sebesar 0,0062 (lebih kecil dari 5%), maka  $H_a$  gagal ditolak. Disimpulkan bahwa variabel-variabel independen (IPG, KPP, IDG, dan PTP) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu PDRB per kapita. Uji t-statistik untuk mengetahui kelayakan model penelitian secara parsial, terdapat 3 variabel independen yaitu IPG, KPP, dan PTP yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dalam  $Adj R^2$  senilai 20,34%, artinya kemampuan variabel independen penelitian ini dapat berkorelasi dengan variabel dependen senilai 20,34%, sedangkan persentase sisanya yaitu 79,66% dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya selain di dalam penelitian ini. selain variabel independen dalam penelitian. Hasil estimasi keluaran REM dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Keluaran Model REM

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Probabilitas	Kesimpulan
IPG	4670.471	2233.323	2.0913	0.0422	$H_{IPG}$ diterima
KPP	3959.645	1145.361	3.4571	0.0012	$H_{KPP}$ diterima
IDG	-3821.365	1014.919	-3.7652	0.0005	$H_{IDG}$ ditolak
PTP	979.2648	467.0332	2.0968	0.0417	$H_{PTP}$ diterima
<i>Goodness of Fit</i>					
$R^2$				0.2684	
Adj $R^2$				0.2034	
F-statistik				4.1275	
Probabilitas (F-statistik)				0.0062	

Sumber: Hasil Pengolahan Data E-views 9.0

Berdasarkan Tabel 3, maka model persamaan regresi data panel pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = -254965.8 + 4670.471IPG_{it} + 3959.645KPP_{it} - 3821.365IDG_{it} + 979.2648PTP_{it} + \epsilon_{it} \dots$$

(2)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi suatu tantangan bagi setiap negara di dunia. Indonesia telah menjalankan Tujuan Pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan menjadi salah satu fokus Pemerintah Indonesia dan berbagai pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi keluarganya dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang IPG dan IDG masih dibawah rata-rata Indonesia, dengan nilai masing-masing sebesar 91,08 dan 52,54 (Badan Pusat Statistik, 2022a, 2023b). Menurut Bertay et al. (2020) bahwa ketimpangan gender apabila tidak segera diatasi oleh pemerintah dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kesetaraan gender diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Penelitian ini melihat pengaruh partisipasi perempuan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Nusa Tenggara Barat.

Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu variabel independent dalam penelitian ini, untuk melihat rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan IPM laki-laki. Pada Tabel 3, IPG memiliki nilai koefisien sebesar 4670.471, artinya IPG meningkat senilai 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat rata-rata senilai 4670.471%, asumsi ceteris paribus. Nilai probabilitas pada uji signifikansi sebesar 0.0422 atau lebih kecil dari 5%, maka  $H_{IPG}$  diterima. Hasil ini menandakan bahwa Indeks Pembangunan Gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori dan beberapa penelitian yang menerangkan bahwa Indeks Pembangunan Gender berpengaruh positif signifikan pada perekonomian di daerah (Novtaviana, 2020; Nursini & Syahrul, 2022; Sari, 2021). Kondisi Indeks Pembangunan Gender ini mengukur korelasi dalam memprioritaskan kesetaraan gender dalam berbagai sektor terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (Arifin, 2018) menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam membantu perekonomian keluarganya cukup besar dan masih potensial untuk ditingkatkan kapasitasnya. Walaupun Indeks Pembangunan Gender Nusa Tenggara Barat masih dibawah Indeks Pembangunan Gender Indonesia, tapi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam indikator Indeks Pembangunan Gender selama tahun 2017-2021 terhadap PDRB per kapita.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) menjadi indikator keterwakilan perempuan di bidang politik. Perempuan harus dapat menyuarakan pendapatnya di tengah masyarakat, sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh nilai koefisien KPP sebesar 3959.645, berarti kenaikan KPP sebesar 1 satuan, maka berdampak meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3959.645%, begitu juga sebaliknya. Uji signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0012 ( $< \alpha = 5\%$ ), maka  $H_{KPP}$  diterima. Kesimpulan dari kedua nilai tersebut adalah adanya pengaruh positif dan signifikan antara Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.



## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 71-82

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Yuslin (2021) bahwa Keterlibatan Perempuan di Parlemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian. Sistriatmaja & Samudro (2022) menambahkan peranan perempuan menjadi seorang pemimpin dalam lembaga eksekutif secara rata-rata mampu meningkatkan performa PDRB. Partisipasi perempuan di Nusa Tenggara Barat dalam bidang politik, dapat menjadi upaya bagi setiap perempuan untuk dapat mengembangkan diri, menurunkan tingkat diskriminatif gender, meningkatkan produktifitas perempuan, dan mampu menambah pendapatan bagi keluarganya. Partisipasi perempuan yang semakin meningkat di parlemen, dapat meningkatkan keputusan politik yang semakin substansial dan akomodatif, serta mampu meningkatkan kualitas gagasan dalam hal peraturan yang mendukung kaum perempuan dan anak (Supanji, 2021).

Tabel 3 menunjukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki nilai koefisien negatif sebesar 3821.365, berarti Indeks Pemberdayaan Gender meningkat sebesar 1 satuan, akan menurunkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3821.365%, begitu juga sebaliknya. Nilai probabilitas sebesar 0,0005 (lebih kecil dari 5%), maka  $H_{IDG}$  ditolak. Hasil temuan ini memiliki kesimpulan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender korelasi yang negatif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang menerangkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah (Infarizki et al., 2020; Novtaviana, 2020). Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Roseana (2022), Sari (2021), dan Sari & Arif (2022) yang melaporkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender belum memberikan korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini mengidentifikasi bahwa Indeks Pemberdayaan Gender di Nusa Tenggara Barat belum mampu memberikan dampak yang positif dalam PDRB per kapita. Kapabilitas pemberdayaan perempuan di daerah masih dibawah dari kapabilitas laki-laki, sehingga akan mempengaruhi peran aktif kaum perempuan dalam sektor ekonomi dan politik. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat perlu membuat kebijakan dalam meningkatkan kesetaraan gender, sehingga ketimpangan gender semakin menurun dan mampu meningkatkan peran perempuan di sektor ekonomi dan politik. Upaya peningkatan IDG dapat diterapkan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bekerja dan menambah pendapatan bagi keluarganya, stakeholder tidak mendiskriminasi kaum perempuan dalam pekerjaan, dan upaya pembuatan peraturan daerah yang mendukung kaum perempuan dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam bekerja.

Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP) adalah tingkat partisipasi perempuan dalam bekerja dan sebagai tenaga profesional di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Tabel 3, menunjukkan bahwa nilai koefisien PTP sebesar 979.2648, artinya kenaikan nilai PTP sebesar 1 satuan, mampu memberikan peningkatan rata-rata PDRB per kapita sebesar 979.2648%. Nilai probabilitas pada uji signifikansi sebesar 0.0417 (< 5%), maka  $H_{PTP}$  diterima.

Kesimpulannya bahwa Perempuan sebagai Tenaga Profesional memberikan korelasi yang positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Renie (2019) bahwa Perempuan sebagai Tenaga Profesional memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian di daerah.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor perekonomian dan menjadi tenaga profesional dapat memberikan dampak dalam peningkatan pendapatan bagi keluarga dan pertumbuhan ekonomi. Rajagukguk (2015) menambahkan bahwa tingginya tingkat perempuan menjabat posisi tertinggi dan menjadi tenaga profesional ditentukan oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang semakin tinggi. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah mampu membuat kebijakan yang mendukung perempuan sebagai tenaga profesional dan menjabat posisi tertinggi di pemerintahan dan perusahaan swasta. Hal ini menandakan bahwa kualitas kaum perempuan dalam dunia pekerjaan tidak kalah berkualitas dengan kaum laki-laki.

Hasil temuan memvisualisasikan tingkat partisipasi perempuan di Nusa Tenggara Barat terhadap pertumbuhan ekonomi sudah baik pada indikator Indeks Pembangunan Gender, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional. Selain itu, Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 5 yaitu kesetaraan gender, apabila dilihat dari hasil penelitian ini. Tetapi pemerintah daerah perlu meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tengah masyarakat, sehingga mampu meningkatkan PDRB dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan publik dan *stakeholder* sebagai pelaksana penerapan kebijakan publik di Nusa Tenggara Barat, dapat saling berkoordinasi terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sehingga kaum perempuan mampu bersaing dalam dunia pekerjaan dan mampu menurunkan ketimpangan gender yang masih ada ditengah masyarakat.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi perempuan dalam peningkatan PDRB per kapita (proksi pertumbuhan ekonomi) di Nusa Tenggara Barat, yang dianalisis dalam empat indikator Indeks Pembangunan Gender, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional dari tahun 2017-2021 merupakan tujuan dalam penelitian ini. Analisis statistik menyatakan *Random Effect Model* (REM) menjadi model ekonometrik terpilih untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian daerah, sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 5-pun telah cukup berjalan dengan baik. Partisipasi perempuan yang semakin meningkat, akan membantu pendapatan rumah tangga dan perekonomian daerah, serta menurunkan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Saran penelitian bagi peneliti selanjutnya yaitu penambahan indikator atau variabel independent di bidang Pendidikan, kesehatan, pengeluaran, dan pendapatan.

## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram  
Mataram, 05 April 2023  
ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023  
pp. 71-82

Penambahan indikator ini akan meningkatkan referensi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Selain itu, diharapkan peneliti dapat menggunakan metode pengolahan data penelitian yang berbeda, sehingga terlihat perbandingan variasi hasil analisis.

### REFERENSI

- Amory, J. D. S. (2019). Peranan Gender Perempuan dalam Pembangunan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v23i1.1872>
- Badan Pusat Statistik. (2022a, April 10). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2010-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik. (2022b, April 10). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen, 2010-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik. (2022c, April 10). *Perempuan sebagai Tenaga Profesional, 2010-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik. (2023a, February 28). *PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023b, March 8). *Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2010-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>
- Bertay, A. C., Dordevic, L., & Sever, C. (2020). Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry-Level Data. *IMF Working Paper*, 1–42.
- Ginting, E., & Sihura, H. Z. (2020). Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender. *Jurnal Inada*, 3(2), 201–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/ji.v3i1.2458>
- Gujarati, D., Porter, D., & Gunasekar, S. (2017). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw Hill Education.
- Infarizki, A. Y., Jalunggono, G., & Laut, L. T. (2020). Analisis pengaruh ketimpangan gender terhadap produk domestik regional bruto di Jawa Tengah tahun 2010-2018. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 2(2), 528–547. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i2.1387>
- Nova, M. A. (2022). Peran perempuan dalam pembangunan desa (Studi feminisme dan gender pada perempuan Desa Blang Krueng Aceh Besar). *Jurnal Al-Ukhwah*, 1(1), 1–13.
- Novtaviana, W. (2020). *Pengaruh indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Indonesia tahun 2014-2018* [Undergraduate Thesis]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Nursini, N., & Syahrul, S. (2022). Tinjauan peran kualitas gender dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 14–27.
- Rajagukguk, W. (2015). Determinan Perempuan Menduduki Posisi Tenaga Profesional di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 10(1), 173–189.
- Renie, E. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Inklusif. *Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 10–17. <https://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/download/1984/1479>
- Roseana, N. V. (2022). *Peran Perempuan terhadap Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020* [Undergraduate Thesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Sari, C. P. (2021). Gender inequality: dampaknya terhadap pendapatan per kapita (Studi kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019). *Berdikari: Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 47–52.

## Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 71-82

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.11594/jesi.01.01.06>

- Sari, R. M., & Arif, M. (2022). Women's emancipation in their contribution to economic development in the Surakarta Residency Region 2016-2020. *Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022*, 482–502. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2100>
- Sekretariat Nasional SDGs. (2022). *Sekilas SDGs*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Sistriatmaja, M. B., & Samudro, B. R. (2022). Eksistensi Kepala Daerah Perempuan Terhadap Performa Ekonomi Daerah Di Indonesia. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 3(2), 133–157.
- Supanji, T. H. (2021, April 15). *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. <https://www.kemencopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162–170. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>